

## KALURAHAN TIRTOHARGO DAPAT BANTUAN PAMSIMAS

# Air Ratusan Sumur Warga Tak Layak Konsumsi

**BANTUL (KR)** - Mata air dari ratusan sumur di Dusun Kalangan dan Karang Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul, dinilai kurang layak untuk dikonsumsi. Hal itu berdasarkan hasil pengecekan laboratorium Puskesmas setempat.

Sementara Pemerintah Kalurahan Tirtohargo memberikan solusi agar kedepannya warga memanfaatkan sumber air dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Pamsimas bantuan dari Kementerian PU lewat Dinas PU ESDM DIY tersebut sekarang tengah dikerjakan dengan progres mencapai 90%.

"Khusus untuk Dusun Kalangan dan Karang itu hampir semua sumur, airnya tidak layak untuk dikonsumsi. Penyebabnya karena airnya banyak meng-

andung zat kapur dan zat besi. Tapi Alhamdulillah untuk tahun 2024 untuk kebutuhan air bersih Dusun Karang dan Kalangan ke depan, kita sudah mendapat bantuan dari pemerintah pusat lewat Dinas PU DIY sebanyak Rp 400 juta," jelas Lurah Tirtohargo Kretek, Sugiyanto, Rabu (11/9).

Dana tersebut untuk mengembangkan Pamsimas di Tirtohargo Kretek. "Alhamdulillah sekarang ini sudah berjalan mencapai hampir 90% pipa terpasang untuk Dusun Karang dan Kalangan," ujarnya.

Artinya pipa pertama jalur



KR-Istimewa

**Dinas PU DIY melakukan pengecekan program Pamsimas di Tirtohargo Kretek Bantul.**

utama sudah terpasang kemudian baru disebar ke masing-masing rumah. Nantinya kata Sugiyanto, semua rumah ter-

jangkau air bersih, meski sejauh ini baru sekitar 100 rumah tersambung dengan jaringan air bersih. Dengan angka tersebut,

sejauh ini masih kekurangan sekitar 300 kepala keluarga yang belum mendapatkan air bersih tersebut.

Sugiyanto berharap Dinas PU Kabupaten Bantul dan Dinas PU DIY bisa membantu agar tahun depan di Kalurahan Tirtohargo bisa terkoneksi jaringan sumber air bersih. Sugiyanto mengungkapkan, merujuk data jumlah sumur di dua dusun yang airnya tidak layak konsumsi mencapai 200 titik. "Hampir kira-kira 200-an sumur, karena per kepala keluarga itu kan mempunyai sumur sendiri-sendiri. Sebagian sumur bor, sebagian sumur pakai bis beton. Yang sumur bor itu hampir semua tidak layak untuk dikonsumsi," ujar Sugiyanto.

Dijelaskan, ada Pamsimas air tersebut tetap dikonsumsi kare-

na tidak ada sumber air lain. "Kita baru mengetahui bila sekitar 200 sumur di Kalangan dan Karang airnya tidak layak konsumsi berdasarkan pemeriksaan dari Puskesmas. Pada waktu itu dicek lewat laboratorium dari Puskesmas ternyata sumur-sumur itu banyak mengandung zat besi dan zat kapurnya. Maka Kami mengusulkan untuk Pamsimas untuk sumber air bersih. Alhamdulillah direspon oleh pemerintah pusat lewat pemerintah Yogyakarta," ujarnya.

Pengerjaan sudah dilakukan hampir 2 bulan, direncanakan September ini nanti sudah mengalir. "Selama belum ada Pamsimas warga yang dari Kalangan maupun dari Karang itu airnya dari sumur-sumur itu juga," jelasnya. (Roy)-f

## KEMBANGKAN KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN RSUD Bantul Luncurkan 'Kersa Paseban'

**BANTUL (KR)** - RSUD Panembahan Senopati Bantul meluncurkan program Kerjasama Panembahan Senopati Bantul (Kersa Paseban). Program ini merupakan aksi perubahan kerja sama sponsorship yang bertujuan untuk mendukung peningkatan pengetahuan dan atau keterampilan serta pengembangan profesi tenaga kesehatan di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Program ini diinisiasi oleh Kepala Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan RSUD Panembahan Senopati Bantul, Harini Dewanti SSI Apt.

Menurut Harini, Selasa (10/9), 'Kersa Paseban' dilatarbelakangi belum terkelolanya sponsorship bagi tenaga kesehatan untuk kegiatan pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Sponsorship Bagi Tenaga Kesehatan.

Tujuan dari program ini adalah terkelolanya sponsorship bagi tenaga kesehatan di RSUD Panembahan Senopati Bantul secara akuntabel dan transparan untuk men-

dukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu 60 % karyawan mendapatkan pelatihan minimal 20 jam dalam satu tahun.

Program ini hadir sebagai alternatif solusi pengembangan kompetensi tenaga kesehatan di RSUD Panembahan Senopati Bantul yang meliputi pembentukan tim, Focus Group Discussion (FGD), koordinasi dengan stakeholders baik internal maupun eksternal, penyusunan regulasi (Pedoman, SPO, Naskah PKS), pembentukan Tim Pengelola Sponsorship dan implementasi program kegiatan ilmiah.

Mekanisme pemberian Sponsorship bagi tenaga kesehatan yaitu harus melalui institusi dalam hal ini RSUD Panembahan Senopati, tidak boleh diberikan secara langsung kepada individu tenaga kesehatan dan harus memenuhi beberapa prinsip yang meliputi tidak boleh mempengaruhi independensi tenaga kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan, tidak dalam bentuk uang atau setara uang. (Jdm)-f

## Pemkab Bantul Komit Dukung Program ETPD

**BANTUL (KR)** - Di era digitalisasi saat ini, pelayanan publik yang cepat, efisien dan aman menjadi suatu keharusan. Karena itu Pemkab Bantul terus berkomitmen untuk mendukung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih, mengemukakan hal tersebut pada acara High Level Meeting ETPD, launching bayar pajak dengan Qris (Pakde Qris) dan pengundian hadiah 39 sepeda motor dan grand prize 1 mobil bagi wajib pajak pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBBP2) yang digelar di Ballroom Hotel Grand Rohan Jogja, Rabu (11/9).

Menurut Halim, ETPD

menjadi bagian dari langkah besar menuju transformasi digital, yang tidak hanya akan meningkatkan kualitas layanan publik, tapi juga mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan daerah.

Selain itu melalui peluncuran Quick Response Indonesian Standard (QRIS) sebagai inovasi baru dalam pembayaran pajak daerah. "Saya berharap masyarakat Bantul dapat membayar pajak dengan lebih mudah, cepat, aman, kapan saja dan dimana saja. Ini adalah solusi digital yang inklusif, dirancang untuk memfasilitasi masyarakat agar lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sekaligus mendukung upaya dalam meningkatkan Pen-



KR-Judiman

**Bupati Bantul melaunching program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).**

dapatan Asli Daerah (PAD)," harap Bupati Bantul.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, Drs Trisna Manurung MSi, menambahkan tujuan inovasi Bayar Pakde QRIS (Bayar Pajak dengan QRIS) adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memba-

bayar pajak daerah. Sedangkan manfaatnya adalah untuk memberikan layanan prima kepada wajib pajak melalui implementasi teknologi pembayaran digital bertujuan inovasi Bayar Pakde QRIS (Bayar Pajak dengan QRIS) adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memba-

(Jdm)-f

## SATPOL PP BANTUL MELAKSANAKAN PENEGAKAN PERDA

# Menggelar Operasi Non Yustisi Dengan Pengawasan Usaha Panti Pijat dan Sejenisnya

**BANTUL (KR)** - Birokrasi pemerintahan akan berjalan dengan baik dan benar apabila para aparatur dan masyarakat mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan peraturan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu peran Pemerintah Daerah adalah mengatur penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum di masyarakat berjalan secara kondusif.

Berdasarkan fenomena akhir-akhir ini ternyata banyak situasi yang sedikit mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul. Salah satu dari situasi tersebut adalah banyaknya aduan dari masyarakat terkait dengan maraknya usaha salon, spa, panti pijat, dan usaha lain yang sejenis yang diduga untuk transaksi tindakan asusila atau pelanggaran di dalamnya.

Dengan kondisi tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul mempunyai tugas dan wewenang membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan agar situasi di wilayah Kabupaten Bantul tetap kondusif dan aman dan bersih dari segala sektor usaha yang "kotor" dan ilegal yang tentunya akan merusak citra Kabupaten Bantul. "Sehingga sektor usaha tersebut perlu dikendalikan dan diawasi ke depannya

agar berjalan sesuai Peraturan Daerah yang ada," kata Kepala Satpol PP Bantul, R Jati Bayubroto SH MHum.

Satpol PP Bantul juga telah melakukan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap usaha salon, spa, panti pijat dan usaha yang sejenisnya. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap dan setiap tahap dipimpin langsung oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bantul R Jati Bayubroto SH MHum.

Tahap pertama dilaksanakan pada 27 Agustus 2024 di wilayah Kapanewon Kasihan. Kegiatan ini menjangkau 6 lokasi usaha salon, spa, dan panti pijat. Dalam pengecekan dan inspeksi oleh petugas Satpol PP Kabupaten Bantul, dari 6 lokasi tersebut ditemukan 4 tempat ada izin melalui online atau OSS (Online Single Mission) atau daring dan 2 tempat belum memiliki izin sama sekali.

Tahap ke dua, dilaksanakan pada 28 Agustus 2024 di wilayah Kapanewon Sewon. Ada 5 lokasi usaha salon, spa, dan panti pijat yang disasar. Hasil pengecekan dan inspeksi oleh petugas dari 5 lokasi tersebut semuanya berizin melalui OSS secara online.

Tahap Ketiga dilaksanakan pada 2 September 2024 di wilayah Kapanewon Sewon dan Kapanewon Kasihan. Dalam kegiatan kali ini ditargetkan ada 9 Lokasi usaha salon, spa,

dan panti pijat dan setelah dilakukan pengecekan dari 9 lokasi tersebut ada 3 tempat usaha tidak dapat menunjukkan berkas perizinan dan 6 tempat usaha memiliki berkas perizinan OSS secara online.

Setiap tahapan dilakukan edukasi kepada pemilik salon atau panti pijat, bahwa untuk izin tidak cukup melalui OSS. Disampaikan bahwa perizinan apa saja yang harus dipenuhi agar usaha tersebut bisa berjalan dan legal, khususnya perizinan dari Dinas Kesehatan.

Bagi mereka yang tidak dapat menunjukkan berkas perizinan secara lengkap, maka dilakukan tindakan penutupan dan penghentian operasional sementara oleh petugas yang disetujui oleh pemilik usaha dengan menandatangani Berita Acara penghentian operasional sampai dengan perizinan lengkap dan legal.

Selain itu petugas juga menghimbau agar dalam menjalankan usaha untuk menjaui potensi atau peluang ke arah tindakan pelanggaran atau asusila dan tetap menjaga situasi kondusif dengan masyarakat sekitar tempat usaha.

Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah dilaksanakan acara sosialisasi perizinan berusaha bagi usaha salon, spa, panti pijat dan usaha sejenisnya pada tanggal 6 September 2024. Dalam acara ini dihadiri oleh 20 peserta dari salon, spa,



KR-Judiman

**Menertibkan tempat panti pijat**

dan panti pijat yang ditindak dari kegiatan tahap pertama sampai tahap ke tiga. Acara ini dihadirkan narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, dan DPMPSTP Kabupaten Bantul, dan langsung dibuka oleh Kasatpol PP Kabupaten Bantul.

Menurut R Jati Bayubroto, kegiatan ini mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum, Dan Pe-

raturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

Maksud dan tujuannya, yakni agar pelaku usaha salon, spa, panti pijat, dan usaha lain yang sejenis menjalankan usahanya sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada. Baik dalam hal perizinan yang harus lengkap dan tepat, namun juga pelaksanaan kegiatan di dalamnya juga harus sesuai peruntukannya. Tujuannya, memberikan pemahaman kepada

masyarakat tentang Peraturan Daerah mengenai Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul dan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum.

"Juga meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan meningkatkan ketaatan bagi perorangan atau badan usaha dalam hal perizinan berusaha sesuai dengan peruntukannya," pungkas R Jati Bayubroto. (Jdm)



KR-Judiman

**Satpol PP Kabupaten melaksanakan operasi Non Yustisi**



KR-Judiman

**Meminta keterangan kepada petugas pijat yang diduga melakukan praktek asusila**



KR-Judiman

**Memberikan pengarahannya kepada pemilik usaha salon dan panti pijat.**